#### **PENGARUH PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL DAN RESTORAN TERHADAP PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA BIDANG PENDAPATAN**

#### **BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET**

# KOTA BANJAR

**Suherman**

**NPM : 168010032**

# ABSTRAK

Penelitian ini didasarkan kepada masalah terjadi di lapangan yaitu pemungutan pajak hotel dan restoran belum memberikan konstribusi yang optimal terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Kota Banjar.

Metode penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis dengan pendekatan kuantitatif. Metode Deskriptif menurut Sugiyono (2002:24) adalah metode yang bersifat menggambarkan suatu keadaan yang sedang berlangsung pada saat penelitian dilaksanakan, serta bagaimana hubungannya. Data yang ditetapkan dianalisis dan dibandingkan dengan teori yang ada serta masalah yang ada untuk diambil kesimpulannya. Adapun variabel penelitiannya adalah pemungutan pajak hotel dan restoran sebagai variabel bebas dan penerimaan Pendapatan Asli Daerah sebagai variabel terikat.

Hasil Penelitian secara simultan pemungutan pajak hotel dan restoran telah memberikan pengaruh cukup besar, positif dan signifikan terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Kota Banjar (85,5%). Artinya pemungutan pajak hotel dan restoran sangat dominan dan dapat menentukan terhadap tercapainya penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Kota Banjar. Hasil temuan penelitian juga menemukan bahwa variabel penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Kota Banjar ternyata tidak hanya dipengaruhi oleh pemungutan pajak hotel dan restoran semata, tetapi ada variabel lain yang juga ikut mempengaruhi terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah tersebut (19,5%).

Pemungutan pajak hotel dan restoran secara parsial telah memberikan pengaruh terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Kota Banjar. Hal tersebut tercermin dari hasil penelitian dimana menggambarkan bahwa pemungutan pajak hotel dan restoran di ukur melalui pemungutan pajak harus adil, harus berdasarkan undang-undang, tidak mengganggu perekonomian, harus efesien dan harus sederhana berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Kota Banjar. Adapun pengaruh yang terbesar adalah syarat sistem pemungutan pajak harus sederhana. Sedangkan pengaruh yang paling kecil adalah harus berdasarkan undang-undang dan tidak mengganggu perekonomian

***ABSTRACT***

*This research is based on problems occurring in the field, namely the collection of hotel and restaurant taxes has not provided an optimal contribution to the receipt of Local Revenue in the City of Banjar.*

*The research method used by researchers in this study is descriptive analysis with a quantitative approach. Descriptive method according to Sugiyono (2002: 24) is a method that is describing a condition that is ongoing at the time the research was carried out, as well as how the relationship. The data set is analyzed and compared with existing theories and problems that are available to draw conclusions. The research variable is collection of hotel and restaurant taxes as independent variables and receipts of Regional Original Income as the dependent variable.*

*Research results simultaneously collecting hotel and restaurant taxes has a considerable, positive and significant influence on the receipt of Regional Original Income in Banjar City (85.5%). This means that hotel and restaurant tax collection is very dominant and can determine the achievement of regional revenue in Banjar City. The results of the study also found that the variables of Regional Original Revenue in Banjar City were not only influenced by the collection of hotel and restaurant taxes, but there were other variables which also influenced the receipt of Regional Revenue (19.5%).*

*Hotel and restaurant tax collection partially has an influence on the receipt of Local Revenue in the City of Banjar. This is reflected in the results of the study which illustrates that the collection of hotel and restaurant taxes is measured through tax collection must be fair, must be based on laws, do not interfere with the economy, must be efficient and must be simple and positively and significantly affect the revenue of Regional Original Income in Banjar City . The biggest influence is the requirement that the tax collection system be simple. While the smallest influence is to be based on law and not disrupt the economy.*

1. pemungutan pajak tidak mengganggu kegiatan produksi dan tidak menimbulkan kelesuan perekonomian di masyarakat.sehinggapenerimaan PAD di Kota Banjar dapat tercapai secara efektif.

**DAFTAR PUSTAKA**

Atmosudirdjo.Prajudi.2009. Administrasi dan Manajemen. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Arikunto, Suharsimi. 1996. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek Bandung: Tarsito.

Bellone.Carl J; 1982.*Organization Theory And The New Public Administration*. Allyn and Bacon. Inc. Jakarta: Gramedia.

Devas, Nick., et.al. 2009. Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia. Jakarta: Penerbit UI Press.

Farland, Dalton. E, Mc. 1999. *Management.* New York: Macmillan Pubishing.

Gibson. 1996. Organisasi dan Manajemen. Dalam Wahid Jakarta: PT Toko Gunung Agung.

Handayaningrat, Suwarno. 2006. Administrasi Pemerintahan Dalam Pembangunan Nasional. Jakarta: PT.Gunung Agung.

Henry, Nicholas. 1995. Administrasi Negara dan Masalah-masalah Publik. Alih Bahasa Luciana D. Lontoh Jakarta: Rajawali Pers.

Hutagaol, John. 2007. Implementasi Kebijakan Pemeriksaaan Pajak Dalam Rangka Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak, Jurnal Akuntansi, 03: 334- 343.

Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. 2007. Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia (jilid 1). Jakarta: Gunung Agung.

Mardiasmo. 2011. Perpajakan.Yogyakarta: Penerbit Andi.

Moenir, AS. 2002. Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia. Bandung: Bumi Aksara.

Ndraha, Taliziduhu. 2001. Ilmu Pemerintahan (Kybernology).Bandung: ProgramPascasarjana S2 dan S3 Ilmu Pemerintahan. Kerjasama IIP-UNPAD.

Nigro, Felix A and Nigro, Lloyd, G. 1983.*Modern Public Administration*. California: Harper and Row.

Pamudji, S. 2004. Profesionalisme Aparatur Negara dalam Meningkatkan PelayananPublik. Jakarta: IIP.

Permata, Agus. 1997. Manajemen Pelayanan Masyarakat. Bandung: AlfaBeta.

Pfifner, John Mc Donald. 1975. *Principles of Public Administration*. California: Ronald Press.

Presthus, Robert Vance. 1975. *Public Administration*. University of Michigan. Ronald Press, Co.

Robbins, Stephen. Fayol, Henry. 2010. Teori Organisasi Struktur, Desain dan Aplikasi Edisi 3. Terjemahan Pasolong. Jakarta: Arcan.

Sulastiono, Agus. 2006. Manajemen Pelayanan Masyarakat.Bandung: AlfaBeta

Siagian, P. Sondang. 2007. Patologi Birokrasi Analisis, Identifikasi dan Terapinya. Jakarta: Galia Indonesia.

Siahaan, P. Marihot. 2005. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.

Silalahi. 2009. Sistem Administrasi Pemerintahan. Jakarta: Bina Aksara.

Soedjadi. 2009. Manajemen Personalia. Metode Penelitian Administrasi. Bandung: Alfabeta.

Soetopo. 1999. Pelayanan Prima. Bandung: CV. Mandar Maju.

Sobandi, Baban. 2002. Etika Kebijakan Publik.Jakarta: Mutiara Ilmu.

Steers. Richard. 1994. Efektivitas Organisasi. Terjemahan Magdalena Jamin. Jakarta: Erlangga.

Sugiyono. 2002. Metode Penelitian Administrasi. Bandung: AlfaBeta.

Suharsimi, Arikunto.1998. Prosedur Penilitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: Bineka Cipta.

Tjokroamidjojo, Bintoro. 2004. Reformasi Administrasi Publik. Jakarta: Universitas Krisnadwipayana.

Tjiptono, Fandi. 2006. Manajemen Jasa. Yogyakarta: Andi.

Winardi, J. 2001. Manajemen. Bandung: Rhineka Cipta.

Waluyo dan Ilyas B. Wiryawan. 2011. Perpajakan Indonesia. Jakarta: Salemba Empat.

White. Jay. D. 1994. *Research in Public Administration*. Universitas Michigan Sage Publications.

**Dokumen:**

Lilla Andini. 2017.Pengaruh Pertumbuhan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Empiris pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2011-2015), Undip Semarang

Doni Alfianthoro. 2017.Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli DaerahKota Bekasi.Universitas Brawijaya Malang.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014. tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009.dalamPengelolaan Pajak Daerah

Peraturan DaerahKota Banjar Nomor 22 Tahun 2012.tentang Pajak Hotel dan Restoran

Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual

Suryadi. 2006. Model Hubungan Kausal Kesadaran, Pelayanan, Kepatuhan Wajib Pajak dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Penerimaan Pajak, Jurnal Keuangan Publik Vol. 4, No.1